



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

TESIS

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM
PENGGABUNGAN USAHA PADA PERSEROAN
TERBATAS NON BANK PMA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998**

oleh :

Antonius Suhartono

No. Mhs. : 01.770/PS/MIH

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER ILMU HUKUM
2004**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Tesis 2004

TESIS

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM
PENGGABUNGAN USAHA PADA PERSEROAN
TERBATAS NON BANK PMA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN
1998**

Dipersiapkan dan di susun oleh :

Antonius Suhartono
No. Mhs : 01.770/PS/MIH

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal : 19 Maret 2004

Dewan Penguji :

Roedjiono, SH., LL.M.
Ketua

C. Kastowo, SH., MH.
Anggota

V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.
Anggota

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya yang senantiasa melimpah, sehingga penulis diberi Nya kesempatan untuk menyelesaikan penulisan tesis dengan judul, “PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM PENGGABUNGAN USAHA PADA PERSEROAN TERBATAS NON BANK PMA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998”, yang disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Walaupun penulisan tesis ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh sebab itu segala saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan segala kerendahan hati demi penyempurnaan tesis ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin pula menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan, serta bantuan sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih antara lain kepada :

1. Bapak Dr. E.F. Slamet S. Sarwono, MBA., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. J. Sukmawati Sukamulja, MM., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Roedjiono, SH., LL.M., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya selama penyusunan tesis.
5. Bapak C. Kastowo, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penyusunan tesis ini.
6. Tuan Yukio Karakama selaku Presiden Direktur PT. Warna Dai-Nichi Indonesia beserta stafnya, yang telah memberikan fasilitas dan data-data kepada penulis selama dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
7. Kepala dan staf Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis.
8. Pengurus SPSI Unit Kerja PT. Warna Dai Nichi Indonesia, yang telah memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik selama dalam penelitian maupun dalam rangka penyelesaian penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih ingin pula penulis sampaikan kepada isteri dan anak-anak penulis yang telah ikut membantu dengan segala doa, perhatian, pengertian, kesabaran dan pengorbanan yang kemudian mendorong dan menambah semangat penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Murah berkenan memberikan balasan serta melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dan semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, Maret - 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
INTISARI	x
ABSTRACT.....	xi
PERNYATAAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Tesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perusahaan	
1. Pengertian Tentang Perusahaan	11
2. Pengertian Tentang Perseroan Terbatas	18
3. Pengaturan Tentang Perseroan Terbatas	23
4. Organ Perseroan Terbatas.....	25
5. Pendirian dan Pembubaran Perseroan Terbatas.....	46
B. Tinjauan Tentang Perusahaan Perseroan Terbatas Non Bank PMA	
1. Penanaman Modal Asing.....	58
2. Hubungan Antara Pengaturan Tentang Perseroan Terbatas Dalam UUPT dan UPMA.....	75

C. Tinjauan Tentang Penggabungan Perusahaan	
1. Pengertian Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.....	77
2. Pengaturan Terhadap Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.....	81
3. Akibat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas.....	81
4. Faktor-Faktor Dalam Penggabungan (Merger).....	84
5. Tujuan dan Target Penggabungan.....	88
6. Macam-Macam Penggabungan.....	92
7. Tata Cara Penggabungan.....	102
8. Larangan-Larangan Dalam Penggabungan.....	110
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan	
1. Pengertian Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan.....	111
2. Pengaturan Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan (Merger).....	113
E. Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	
1. Pengertian Tentang PHK.....	123
2. Pengaturan Mengenai PHK.....	125
3. Jenis-Jenis PHK.....	134
4. Tata Cara PHK.....	137
5. Hubungan Antara Pengaturan Tentang PHK Dalam Undang-Undang Ketengakerjaan Dengan UPMA Serta UUPT.....	161
 BAB III CARA PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	164
B. Bahan/Materi Penelitian.....	165
C. Alat Pengumpulan Data.....	168
D. Cara Analisis Data.....	169

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Motivasi dan Tujuan Penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia..... 170
2. Proses Penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia..... 173
3. Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia 205
4. Tanggung Jawab PT. Warna Dai-Nichi Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 207
5. Sinkronisasi Antar Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Non Bank PMA Yang Melaksanakan Penggabungan Perusahaan 211

B. Pembahasan

1. Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia 213
2. Tanggung Jawab PT. Warna Dai-Nichi Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 222
3. Sinkronisasi Antar Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Non Bank PMA Yang Melaksanakan Penggabungan Perusahaan 228

BAB V KESIMPULAN

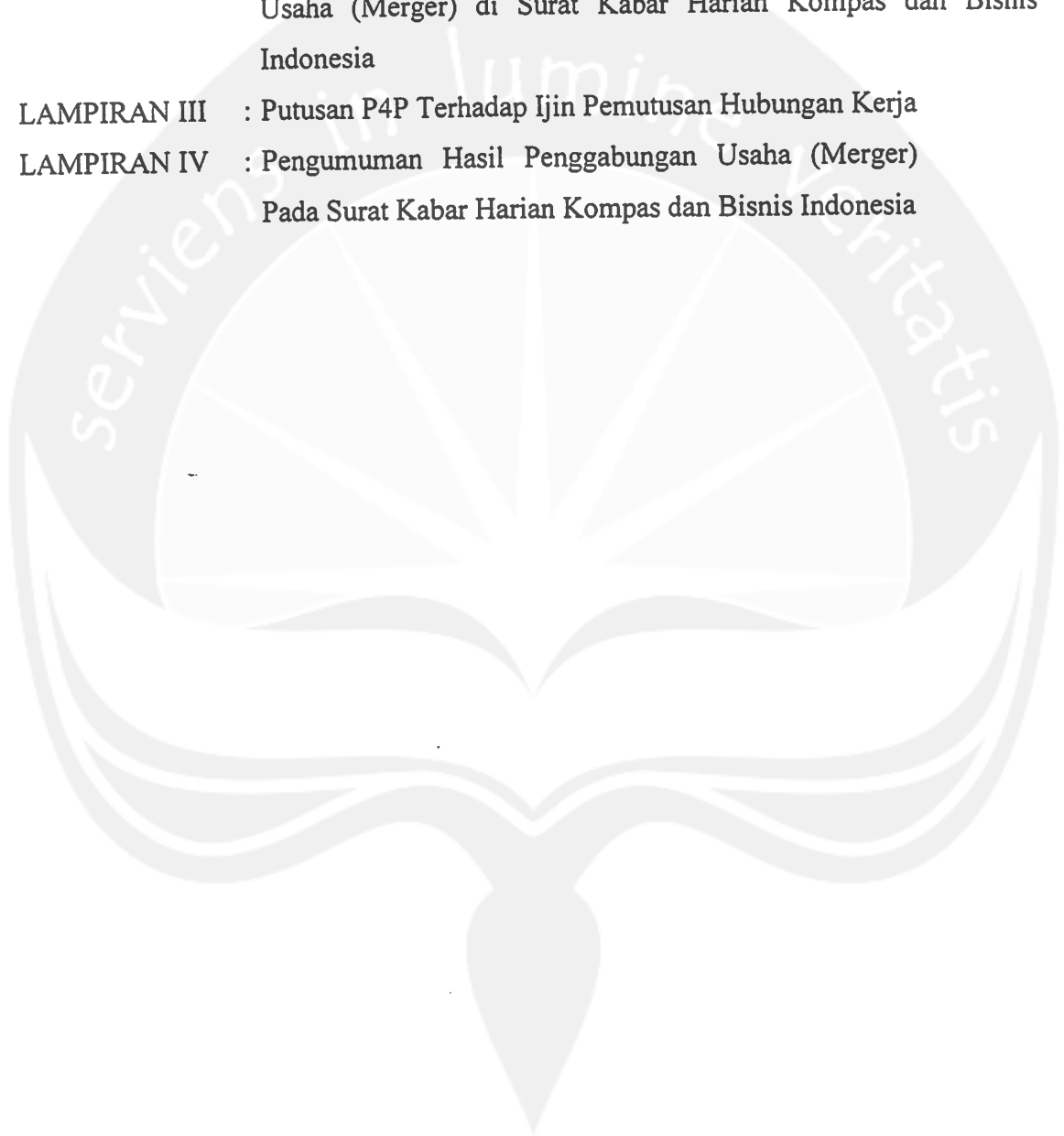
- A. Kesimpulan..... 234
- B. Saran..... 235

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Dari BKPM
- LAMPIRAN II : Pengumuman Secara Tertulis Kepada Karyawan Perihal Terjadinya Merger, Dan Pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha (Merger) di Surat Kabar Harian Kompas dan Bisnis Indonesia
- LAMPIRAN III : Putusan P4P Terhadap Ijin Pemutusan Hubungan Kerja
- LAMPIRAN IV : Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha (Merger) Pada Surat Kabar Harian Kompas dan Bisnis Indonesia



INTISARI

Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Usaha Pada Perseroan Terbatas Non Bank PMA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998

Pelaksanaan penggabungan perusahaan perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, mengakibatkan tenaga kerja yang bekerja pada perseroan terbatas yang melakukan penggabungan cenderung dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut, sebab tenaga kerja seringkali mendapat perlakuan yang tidak seimbang, seperti tiadanya kewajiban yang mengikat bagi perseroan terbatas tentang cara penyelesaian status tenaga kerja yang terkait dalam penggabungan itu. Sebagai akibat dari ketimpangan tersebut, maka tenaga kerja harus menerima adanya PHK.

Dengan latar belakang yang demikian itu, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan perseroan terbatas swasta non bank PMA, khususnya di sektor industri kimia dalam tahun 2001?. 2) Bagaimana tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas swasta non bank PMA tersebut terhadap tenaga kerjanya yang mengalami PHK sebagai akibat pelaksanaan penggabungan perusahaan? 3) Bagaimana sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi adanya PHK terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas swasta non bank PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi: secara obyektif yaitu untuk mengetahui perlindungan terhadap tenaga kerja akibat adanya pelaksanaan penggabungan perusahaan, kemudian untuk mengevaluasi tanggung jawab perusahaan yang melakukan PHK, sebagai akibat adanya penggabungan perusahaan, serta untuk mengetahui sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan yang melakukan PHK sebagai akibat adanya penggabungan yang dilakukan perseroan terbatas tersebut. Secara subyektifnya adalah guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan bahan/materi penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif untuk lengkapnya sering perlu didukung dengan penelitian lapangan. Alat pengumpulan datanya adalah: wawancara dan kuesioner serta studi dokumen. Sedangkan cara analisis data dilakukan dengan jalan interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan proses berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan usaha perseroan terbatas swasta non bank PMA yang dikarenakan tidak terdapatnya sanksi yang mengikat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1998. Tanggung jawab perusahaan dalam melakukan PHK akibat terjadinya penggabungan menjadi tidak jelas karena tidak ada penjelasan secara rinci dari Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 mengenai kepentingan karyawan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam penggabungan. Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis dalam melaksanakan penggabungan usaha dengan PHK terhadap tenaga kerja, tidak terjadi sinkronisasi, hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggabungan perusahaan tidak menunjuk dengan tegas kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PHK sebagai rujukannya.

ABSTRACT

The Protection of The Employees In The Merger of The Private Non-Bank Foreign Investment by Virtue of The Government Regulation Number 27 of 1998

The Implementation of corporate firm merger as stipulated in the Government Regulation Number 27 of 1998 (PP No. 27 of 1998), will result in the termination of employment of the employees of those merged corporate firms. The case is related to the protection of the firm's employees due to unbalanced treatment, such as the lack of obligation for the corporate firms or the resolution of the employees' status concerning the merger. As a result of the unfairness, the employees must accept a termination of employment.

Based on the above backgrounds, the formulation of the case that will be investigated are as follows: 1) How is the protection of the employees in the implementation of merger of private non-bank Foreign Investments especially in the chemical sector in the year 2001? 2) How is the responsibility of the private non-bank Foreign Investments to the employees facing a termination of employment as the impact of the firm's merger? 3) How is the synchronization among the legal rulings which becomes the basis of the termination of employment of the employee working in the private non-bank Foreign Investments which carry out the merger?

The aims at which the research wants to achieve are objectively to find out the kind of protection to the employees as the impact of the merger of those firms to evaluate the responsibility of those firms implementing the termination of employment as the consequence of the firm merger, as well as to recognize the synchronization among the legal rulings used as the basis to implement a termination of employment. Subjectively goal is to meet one of the requirements to get a degree of Law Magister in the post graduate program of Atma Jaya University Yogyakarta.

The kind of approach is legal normative, research and the source/material is bibliographical research comprising of primary, secondary and tertiary legal aspects. For the completion of the normative legal research, it is often supported by a field research. And the data collecting is carried out by : giving interview and questionnaire as well as studying of document. Furthermore the data analytical approach is by legal aspect interpretation or legal aspect assumption. The data of the analytical outcome is then used to make a conclusion by applying deductive thinking process.

Based on the outcome of research and analysis implemented, it is recognized that there is no protection for the employees in the merging realization of the private non-bank Foreign Investments due to the non-existing obligatory sanctions to realize the Article 12 PP No 27 of 1998. The firm's responsibility in the implementation of termination of employment as a consequence of the merger is not clear lacking a detailed statement the Article 4 chapter (1) PP No 27 of 1998 concerning the employee's interest which deserves the merged firm's attention. The synchronization among the legal rulings which become the legal basis in the implementation of merger of corporate firms and the termination of employment do not exist. It is due to the fact in the legal aspects which govern the firm merger does not stick strictly to the legal aspects which deal with the regulation on termination of employment as a reference.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya pribadi dan bukan merupakan kutipan atau dari karya tulis yang telah ada sebelumnya. Semua yang tertulis baik berupa data, teks, tabel, gambar, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, kecuali yang telah secara tertulis diacu dalam tesis ini adalah murni karya saya dan merupakan hasil kerja pribadi.

Yogyakarta, 15 Maret 2004



(Antonius Suhartono)

